

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era Perang Dingin, kawasan Asia Tenggara merupakan “halaman belakang” bagi Tiongkok. Berlandaskan pada konsepsi keamanan tradisional *competitive security* sebagai *role model* kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya, Tiongkok begitu “percaya diri” menjalankan diplomasi keamanannya yang berbasiskan pada *doctrine of use of force* terhadap sejumlah negara-negara di kawasan Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* atau/ ASEAN) yang dianggapnya sekumpulan negara-negara “lemah”, non-komunis dan koalisi anti-Tiongkok sebagai *existing potential threat* bagi kepentingan keamanannya di kawasan.

Untuk mewujudkan kepentingan keamanannya, Tiongkok secara proaktif menjalankan diplomasi keamanannya dengan melakukan serangkaian agresi militer ke negara-negara di kawasan tanpa terkecuali di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam. Pada era Perang Dingin tahun 1979, Tiongkok menginvasi Vietnam dengan tujuan untuk “memberikan pelajaran” karena tindakan Vietnam yang secara unilateral menginvasi Kamboja yang notabene adalah sekutu utama Tiongkok di kawasan.

Tiongkok juga secara konsisten menerapkan politik konfrontasi (*policy of confrontation*) terhadap negara-negara non-komunis di kawasan

Asia Tenggara bahkan sejak terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 hingga pertengahan tahun 1970-an karena adanya konflik ideologi (*ideological clash*) yang dianggap mengancam kepentingan keamanan politiknya (*political security*) dan ambivalensinya dengan ideologi dan identitas nasional Tiongkok Marxisme-Leninisme (Komunisme). Tiongkok juga menganggap ASEAN sebagai “boneka” sekaligus *proxy* Amerika Serikat (AS) dan Sekutunya di kawasan yang bertujuan untuk memperluas agenda *sphere of influence*-nya demi mewujudkan kepentingan ekspansionisme dan hegemonisme AS terhadap Komunisme Tiongkok.

Oleh karena itu, Tiongkok secara masif menerapkan *counter-containment policy* dengan menerapkan kebijakan ekspor revolusi (*policy of “exporting revolution”*) dimana ideologi besar Marxisme-Leninisme (Komunisme) disebarluaskan ke kawasan Asia Tenggara melalui pemberian dukungan politik kepada para pemberontak komunis (*communist rebels*) dan bantuan militernya (*military assistances*) melalui pengiriman pasukan militer Tiongkok guna membantu perjuangan para pemberontak komunis di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk perlawanan terhadap *containment policy* terhadap Komunisme di kawasan¹.

Selain terlibat konflik ideologi, Tiongkok juga secara proaktif terlibat dalam konflik-konflik keamanan tradisional (*traditional-security issues*) dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik teritorial (*territorial disputes*), Tiongkok menerapkan *coercive diplomacy*, dengan menerapkan kebijakan okupasi

¹ Nur Rachmat Yuliantoro. *Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina*. Yogyakarta: Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada, 2012, hal. 106.

militer (*military occupation*) terhadap Konflik Laut Tiongkok Selatan yang mempersengketakan klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan integritas teritorial kepemilikan *Spratly* dan *Paracel Islands*.

Pada tahun 1974, Tiongkok terlibat konfrontasi militer dengan Vietnam atas klaim teritorial kepemilikan *Paracel Island*. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1988, Tiongkok kembali terlibat dalam konfrontasi militer dalam konflik Angkatan Laut (AL) atas klaim teritorial kepemilikan *Spratly Island* dengan Filipina dan Vietnam. Terakhir, pada pertengahan dekade tahun 1990-an, Tiongkok kembali lagi terlibat konfrontasi militer "sengit" dengan Filipina dalam sengketa kepemilikan *Mischief Reef Island* yang menimbulkan gelombang protes ASEAN terhadap Tiongkok yang dianggap begitu ekspansionis dan hegemonik secara militer².

Konsepsi pembangunan keamanan nasional Tiongkok yang menitikberatkan pada *competitive security* dengan memfokuskan pada pembangunan kapabilitas arsenal militer secara ofensif (*offensive grand strategy*)³, dan ambisinya menjadi *a regional power house* dengan berusaha mendominasi struktur keamanan regional serta pengobaran politik konfrontasi terhadap negara-negara ASEAN telah menimbulkan gelombang protes anti-Tiongkok-isme secara masif di kawasan.

² Bambang Cipto. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 172.
³ Dalam sumber literatur lainnya, konsep *offensive grand strategy* juga diistilahkan dengan *offensive military capability*, sebagaimana dikemukakan oleh John Mearsheimer, dalam teorinya *offensive realism* atau teori realisme ofensif.

Ekspansionisme dan hegemonisme Tiongkok yang termanifestasikan dalam praktik-praktik kebijakan luar negeri dan tujuan keamanannya yang agresif dan koersif dianggap oleh ASEAN mendestabilisasi struktur keamanan dan perdamaian yang telah terbangun selama ini di ASEAN. Tindakan destabilitatif Tiongkok ini jelas ambivalensi dengan protokol keamanan utama ASEAN (*ASEAN Security Protocol*) yakni *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA) atau/ Traktat Persahabatan dan Kerjasama antara Negara-negara ASEAN yang dibentuk pada 24 Februari 1976.

Secara elementer, tujuan dibentuk dan diberlakukannya Traktat TACSA ASEAN ini adalah untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan sebuah arsitektur keamanan kawasan. Namun ekspansionisme dan hegemonisme Tiongkok oleh ASEAN, dianggap mengancam keberlangsungan stabilitas dan perdamaian yang telah terbangun selama ini di ASEAN melalui pengadopsian dan penerapan norma-norma dan prinsip-prinsip Traktat TACSA ASEAN tersebut.

Pasca berakhirnya Perang Dingin sejak permulaan dekade tahun 1990-an, Tiongkok mulai menerapkan *revisionist policy* dengan me-reorientasi postur kebijakan luar negeri dan keamanannya terhadap ASEAN dengan melakukan sejumlah reorientasi strategis. Reorientasi tersebut tercermin dari adanya perubahan kebijakan keamanan Tiongkok dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka terhadap ASEAN. Ekspansionisme dan hegemonisme Tiongkok yang tampak sebagaimana tercermin dalam

praktek-praktek kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya pada era Perang Dingin terhadap ASEAN kini secara perlahan-lahan mulai berkurang. Tiongkok mulai melakukan normalisasi hubungan keamanannya dengan ASEAN secara bertahap melalui pendekatan konstruktif terhadap ASEAN.

Oleh karenanya, untuk merealisasikan hal tersebut, Tiongkok mulai menghentikan secara gradual praktik-praktik *coercive diplomacy*-nya serta politik konfrontasinya dengan menarik kembali dukungan politiknya terhadap gerakan komunisme di kawasan dan secara konsisten mulai membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan negara-negara anggota ASEAN yang sempat terputus akibat konflik Perang Dingin.

Pada Agustus 1990 secara resmi Tiongkok membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia yang sempat terputus pada Oktober 1967 dan disusul selanjutnya dengan Singapura pada November 1990. Namun, sejumlah negara-negara ASEAN lainnya menyatakan reluktansinya atas intensi pembukaan hubungan diplomatik dengan Tiongkok sebagai akibat masih melekat kuatnya mentalitas Perang Dingin (*cold war mentality*).

Meskipun demikian, Tiongkok tetap konsisten ingin meningkatkan hubungannya dengan ASEAN melalui keterlibatannya secara proaktif pada forum-forum diplomasi multilateral ASEAN. Pada 19 Juli 1991, Tiongkok berpartisipasi dalam ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 dan memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan niat baiknya

tersebut kemudian ditanggapi positif oleh ASEAN dengan memberikan status Mitra Konsultasi (*consultative partner*) kepada Tiongkok⁴.

Pada Juli 1994 Tiongkok juga menjadi inisiator dan partisipan dalam Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum* atau/ ARF), yang notabene merupakan forum dialog dan konsultasi terkait dengan isu-isu keamanan di kawasan⁵. Dua tahun selanjutnya, pada pertemuan AMM ke-29 Juli 1996 di Jakarta, Tiongkok memperoleh status penuh sebagai salah satu mitra dialog tetap ASEAN setelah ASEAN meningkatkan statusnya⁶. Implikasinya, kedua belah pihak baik ASEAN maupun Tiongkok dapat membicarakan isu-isu strategis khususnya terkait dengan isu-isu politik dan keamanan di kawasan secara konstruktif kelembagaan.

Pada November 1997 untuk pertama kalinya, Presiden Tiongkok Jiang Zemin mengadakan ASEAN-China *Informal Summit* (ASEAN+1 atau/ *ASEAN Plus One*). Dari pertemuan tersebut, menghasilkan *Joint Statement* untuk membangun dan membina hubungan keamanan yang lebih baik lagi dan saling mempercayai untuk menghadapi abad ke-21 (*a decade for "better nurturing relations"*), serta membuat kerangka kerjasama (*cooperations framework*) dan menentukan arah dari keseluruhan pertumbuhan kedua pihak. Sejak saat itu, hubungan bilateral antara Tiongkok-ASEAN formal berlaku, dan mulai berkembang pesat yang ditandai dengan tingginya frekuensi bilateral exchanges dari para pemimpin

Pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-8 (*the 8th ASEAN Summit*) 4 November 2002 di Phnom Penh Kamboja, yang dihadiri oleh para Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Tiongkok membuat satu “langkah besar” dengan menandatangani kesepakatan *Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea (DoC)*. Kesepakatan tersebut secara fundamental berisi tentang penggunaan *non-use of force principle* dan *peaceful settlement of disputes mechanism* dalam menyelesaikan konflik kedaulatan dan klaim tumpang tindih teritorial di Laut Tiongkok Selatan (Konflik LTS) yang melibatkan Tiongkok dengan sejumlah negara ASEAN seperti Brunei, Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Pada Pertemuan Puncak ASEAN dan Tiongkok akhirnya berlangsung pada 8 Oktober 2003 ketika Perdana Menteri (PM) Tiongkok Wen Jiabao menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN-Tiongkok ke-7 (*the 7th ASEAN-China Summit*) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Tiongkok membuat satu langkah mengejutkan (*milestone*) dengan menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerjasama keamanan dengan bersedia mengaksesi *the key ASEAN Security Protocol* atau/ protokol keamanan utama ASEAN yaitu: *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TACSA)* atau/ Traktat Persahabatan dan Kerjasama intra Negara-negara ASEAN dan inter Negara-negara non-ASEAN di kawasan⁷.

⁷ Lidya Christin Sinaga. "Dua Dasawarsa Hubungan ASEAN-Cina." 30 September 2011. LIPI. 11 Desember 2013. <<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/512-dua-dasawarsa>

Kesediaan Tiongkok untuk menjadi bagian dari Traktat TACSA ASEAN tersebut praktis mengejutkan sejumlah negara-negara di kawasan khususnya negara-negara anggota ASEAN. Pasalnya, keinginan untuk terikat pada Traktat tersebut adalah murni atas dasar inisiasi pribadi Tiongkok tanpa adanya paksaan dan desakan dari ASEAN sebelumnya. Berbeda dengan sejumlah mitra-mitra dialog dan konsultasi ASEAN yang justru didesak dan didorong oleh ASEAN untuk bersedia terikat penuh pada struktur hubungan keamanan kawasan melalui mekanisme Traktat TACSA ASEAN tersebut. Selain itu, Tiongkok mengaksesi Traktat tersebut tanpa memproblematisasi substansi TACSA itu sendiri dan secara lugas menyatakan kesediaannya untuk terikat secara penuh pada substansi TACSA.

Keputusan Tiongkok mengaksesi Traktat TACSA ASEAN pada dasarnya merupakan resultan keputusan yang ambivalen dengan kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya pada era Perang Dingin terhadap ASEAN. Di era Perang Dingin, Tiongkok begitu agresif dan ofensif menjalankan diplomasi keamanannya yang “bernuansa” *militarism, use of force, violent means, expansionist* dan *non-pacific settlement of dispute* yang notabene secara substantif *vis-à-vis* terhadap konsepsi pembangunan struktur hubungan keamanan Traktat TACSA ASEAN. Praktis, Tiongkok reluktan untuk membangun struktur hubungan keamanannya dengan ASEAN yang sesuai dengan arsitektur keamanan kawasan, Traktat TACSA ASEAN tersebut. Namun pasca berakhirnya

Perang Dingin, Tiongkok justru ingin menjadi bagian dari Traktat tersebut

dengan mengaksesi Traktat TACSA ASEAN yang sebelumnya dianggap paradoks dan bahkan diabaikan dalam skala prioritas kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, sebagaimana dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu: Mengapa Tiongkok mengaksesi protokol keamanan utama ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA)?.

C. Tujuan Penelitian

Dalam proses pengerjaan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, baik secara subyektif maupun obyektif yaitu:

1. Tujuan Obyektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan penjelasan atas suatu pokok permasalahan yang telah disusun oleh penulis sebagaimana tertera pada Sub. Bab Rumusan Masalah, dan sebagai manifestasi penerapan konsep-konsep yang pernah dipelajari oleh penulis selama menempuh proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Tiongkok dalam menjalin kerjasama

mengaksesi protokol keamanan utama ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA) pada tahun 2003.

2. Tujuan Subyektif

- c. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik kesarjanaan Strata-I (S-1) Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan, sebagaimana dirumuskan oleh penulis di atas, maka penulis menggunakan Konsep Akses, Budaya Strategis, *Soft Power* dan Diplomasi Budaya.

1. Akses (*Accession*)

Berbicara mengenai akses, berarti mempelajari mengenai persoalan perjanjian-perjanjian multilateral, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup. Perjanjian tertutup itu sendiri, sifat jangkauannya terbatas atau/ partikular bagi negara-negara yang ikut membuat suatu perjanjian dan menandatangani. Sedangkan perjanjian terbuka, sifat jangkauannya tak terbatas atau/ universal, berarti negara-negara yang tidak ikut serta membuat suatu perjanjian dapat menjadi pihak yang terikat pada perjanjian tersebut

Dalam bukunya *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Boer Mauna menjelaskan bahwa aksesori merupakan suatu perbuatan hukum dimana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli dari suatu perjanjian multilateral, menyatakan dikemudian hari persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut. Setelah menyatakan diri terikat pada suatu perjanjian, maka kemudian negara tersebut mengirimkan piagam aksesinya kepada negara penyimpan yang kemudian memberitahu kepada negara-negara pihak lainnya. Biasanya, klausula-klausula penutup suatu perjanjian multilateral memuat negara-negara mana saja yang dapat ikut serta untuk terikat dikemudian harinya. Namun, terdapat pula perjanjian-perjanjian multilateral yang mempunyai sifat universal, terbuka bagi semua negara.

Persetujuan suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, dapat dinyatakan dengan aksesori antara lain jika memenuhi dua syarat yaitu: pertama, apabila Traktat atau/ perjanjian internasional tersebut secara tegas menyatakan hal tersebut. Kedua, apabila terbukti bahwa, negara-negara yang ikut serta dalam proses perundingan perjanjian internasional tersebut menginginkan hal yang demikian.

Dalam praktiknya, perlu diingat bahwa aksesori tidak boleh disyaratkan pula dengan tindakan ratifikasi. Aksesori berarti pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri secara definitif

Praktik-praktik aksesi juga diterapkan pada upaya penerimaan oleh suatu negara atas suatu Traktat atau/ Konvensi setelah sejumlah besar ratifikasi yang disyaratkan untuk mulai berlakunya Traktat itu telah disimpan. Dengan demikian misalnya, diperlukan sepuluh upaya ratifikasi untuk mulai diberlakukannya suatu Traktat atau/ Konvensi, dan kesepuluhnya itu telah masuk tersimpan, maka ratifikasi-ratifikasi atau penerimaan berikutnya dapat disebut dengan aksesi-aksesi. Suatu instrumen aksesi tidak menetapkan suatu persetujuan akhir, sampai dilaksanakannya pertukaran atau/ penyimpanan, atau/ pemberitahuan telah mengaksesi kepada negara-negara peserta atau/ negara penyimpan.

Tidak ada bentuk yang tepat bagi suatu instrumen aksesi yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum internasional. Meskipun pada umumnya, instrumen tersebut sama bentuknya seperti instrumen ratifikasi. Suatu bentuk pemberitahuan dengan maksud untuk ikut serta dalam suatu Traktat saja sudah mencukupi. Sesungguhnya, negara-negara yang tidak turut serta dalam pelaksanaan penandatanganan suatu Traktat, secara teori hanya dapat melaksanakan aksesi dengan syarat adanya persetujuan pihak-pihak atau/ negara-negara yang telah menjadi peserta instrumen tersebut. Rasio dari kaidah hukum ini adalah bahwa negara-negara peserta (*signatory parties*) berhak untuk mengetahui dan menyetujui semua peserta lain pada Traktat yang mengikat mereka, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diciptakan oleh

pemberlakuan Traktat tersebut tidak terganggu. Oleh karena itu, biasanya negara-negara yang melakukan aksesinya pada suatu Traktat atau/ Konvensi berdasarkan klausula aksesinya, memungkinkan mereka untuk mengaksesinya setelah batas akhir tenggat waktu penandatanganan Traktat tersebut, dan menentukan prosedur penyimpanan aksesinya-aksesinya⁹.

Sebagai suatu perjanjian internasional yang bersifat universal dan terbuka bagi semua pihak, baik pihak-pihak *non-ASEAN members* maupun *non-Southeast Asian States*, Traktat TACSA ASEAN itu sendiri memungkinkannya untuk diikat secara definitif legal-konstitusional melalui upaya aksesinya atau adhesinya. Tentu saja pengikatan tersebut harus berdasarkan pada persetujuan pihak-pihak yang sebelumnya telah terikat pada Traktat tersebut (*signatory parties*) dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dan diberlakukan oleh Traktat TACSA ASEAN tersebut.

Dalam konteks tindakan Tiongkok mengaksesinya Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan upaya tindakan hukumnya untuk menyatakan pengikatan dirinya terhadap Traktat tersebut. Dengan demikian, Tiongkok secara definitif legal-konstitusional telah menjadi bagian dari Traktat TACSA ASEAN tersebut tanpa harus terlebih dahulu meratifikasinya. Aksesinya terhadap Traktat tersebut mengimplikasikan keikutsertaannya sebagai peserta secara keseluruhan Traktat tersebut, dengan penerimaan penuh dan utuh

⁹ I. G. Starke *Pengantar Hukum Internasional 2*. Trans. Bambang Iriana Diaiaatmadia. 10th.

atas semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Traktat tersebut. Selain itu, tindakan aksesinya juga merupakan bukti keikutsertaannya dalam suatu Traktat dengan status yang sama dengan penandatanganan-penandatanganan aslinya (*signatory parties*) yaitu ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) plus Brunei Darussalam, Negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan Papua New Guinea.

2. Budaya Strategis (*Strategic Culture*)

Penggunaan konsep “budaya strategis” (*strategic culture*) untuk pertama kalinya dipergunakan dalam studi hubungan internasional oleh Jack Snyder pada akhir tahun 1977 dalam bukunya *Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operation*, yang memfokuskan penelitiannya pada pemikiran strategis Uni Soviet tentang kebijakan keamanan dan pertahanan nuklir Uni Soviet (US) terhadap AS. Menurutnya, budaya strategis merupakan serangkaian keyakinan umum, sikap dan pola perilaku para elit militernya yang bersumber pada nilai-nilai kebudayaan yang dianutnya. Lanjut menurut Snyder, paradigma rasionalisme dan *game theory* dalam studi hubungan internasional olehnya dianggap telah gagal dalam memahami mengapa beberapa negara tertentu memiliki perilaku yang khas dan berbeda satu sama lainnya¹⁰.

Ahli strategi (*strategist*) lainnya Colin S. Gray dalam tulisannya *National Style in Strategy: The American Example*, menjelaskan mengenai pengaruh budaya strategis terhadap sikap dan perilaku para aktor-aktor pengambil kebijakan luar negeri suatu negara. Menurutnya, gaya nasional yang berbeda-beda yang berakar dari pengalaman sejarah pada akhirnya akan membentuk suatu karakteristik yang khas dalam pembentukan strategi suatu negara seperti AS dan US. Selanjutnya menurut Gray, budaya strategis merupakan suatu cara berfikir dan bertindak dengan memperhitungkan kekuatan, yang bersumber dari persepsi terhadap pengalaman historis suatu bangsa, persepsi tentang diri sendiri dan pengalaman yang khas yang membentuk suatu masyarakat¹¹. Selain itu, menurut Gray, perilaku strategis itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tentang budaya strategis karena perilaku seperti itu tak terbantahkan lagi dibawa oleh orang-orang yang terisolasi dalam nilai-nilai kebudayaan (*encultured*)¹².

Seiring dengan berkembangnya teori struktural sistem internasional *social constructivism*, seorang konstruktivis Bradley S. Klein dalam tulisannya *Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defence Politics*, Klein menjelaskan mengenai pengaruh budaya strategis terhadap perilaku strategis tertentu. Perilaku strategis itu sendiri dipandang sebagai

¹¹ Colin S. Gray. "National Style in Strategy: The American Example." *International Security* 6.2 (1981), p. 21-22.

praktek-praktek yang mewakili dimana budaya strategis tersebut beroperasi dan dimana budaya strategis tersebut dihasilkan. Dengan demikian, maka dampak dari pemahaman tentang hubungan antara budaya dan perilaku sangat signifikan¹³.

Ahli budaya strategis lainnya, Alastair Iain Johnston dalam bukunya *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, menjelaskan bahwa budaya strategis merupakan sebuah lingkungan ide (*milieu of ideas*) yang membatasi preferensi perilaku atau tindakan suatu aktor, sehingga seseorang bisa memprediksi tentang budaya strategis suatu negara¹⁴. Lebih jauh lagi, Johnston menjelaskan bahwa budaya strategis suatu negara akan memengaruhi bagaimana pilihan strategis yang diputuskannya (*strategic culture as independent variable*). Negara-negara dengan tipe budaya strategis yang berbeda, maka akan berperilaku (*behave differently*) berbeda pula, meskipun mereka secara simultan berada dalam sistem internasional yang anarkis sekalipun¹⁵. Budaya strategis memiliki dua komponen utama sebagai berikut yaitu: *pertama*, budaya strategis merupakan paradigma sentral yang mengajarkan tentang *the nature of conflict, the nature of adversary*, and pandangan mengenai efektivitas penggunaan kekuatan (*efficacy of force*). *Kedua*, serangkaian pilihan strategis yang diputuskan oleh

¹³ Bradley S. Klein. "Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defence Politics." *Review of International Studies* 14 (1988), p. 133.

¹⁴ Alastair Iain Johnston. *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton: Princeton University, 1995, p. 36.

¹⁵ *Ibid.*, p. 264.

suatu aktor diturunkan atau dipengaruhi oleh paradigma sentral tersebut (budaya strategis)¹⁶.

Hampir semua ahli budaya strategis memandang bahwa aspek budaya strategis memainkan peran strategis dalam memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa aspek budaya nasional mencakup banyak elemen. Dalam hal ini, Jeannie L. Johnson dalam tulisannya *Strategic Culture: Methodologies for Research Program*, menjelaskan mengenai elemen-elemen apa saja dari budaya nasional suatu negara yang paling menonjol dalam memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara yang kemudian pada akhirnya membentuk budaya strategis yang unik. Johnson sendiri memandang bahwa budaya strategis itu sendiri serangkaian keyakinan, asumsi dan cara berperilaku yang berasal dari pengalaman bersama dan narasi yang diterima bersama baik secara lisan maupun tulisan yang membentuk identitas kolektif dan hubungannya dengan kelompok lainnya, dan menentukan tujuan dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan keamanan¹⁷.

Selanjutnya, menurut Johnson, terdapat sejumlah elemen budaya nasional yang dianggap bisa bertahan lama sebagai pembentuk budaya strategis suatu negara¹⁸ yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, p. 37-38.

¹⁷ Jeannie L. Johnson. "Strategic Culture: Methodologies for Research Program." *Comparative Strategic Culture: Guidelines Report U.S. Defense Threat Reduction Agency (2006)*, p. 5.

- a. Identitas yang bisa dijabarkan sebagai cara suatu Negara-Bangsa melihat dirinya sendiri yang terdiri atas ciri-ciri karakter nasionalnya, peran yang diinginkan di tingkat regional dan global serta persepsinya mengenai takdir akhirnya.
- b. Nilai-nilai, merupakan *cost-benefit*, faktor material dan atau ide-ide yang menjadi prioritas dan lebih dipilih dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.
- c. Norma-norma, merupakan cara berperilaku yang diterima dan diharapkan.
- d. *Perceptive lens*, merupakan keyakinan, baik yang benar maupun yang keliru dan pengalaman atau kurangnya pengalaman yang memengaruhi bagaimana cara negara tersebut melihat dunia.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, model pendekatan diplomasi keamanan Tiongkok dipengaruhi oleh pemikiran budaya strategisnya, yang dijadikan sebagai keyakinan, asumsi dan cara berperilaku oleh para elit-elit politik pengambil kebijakan keamanan luar negeri Tiongkok (*decisions-makers*) yang berasal dari pengalaman bersama dan narasi pengalaman historis yang diterima bersama secara luas baik secara lisan maupun tulisan yang membentuk identitas kolektif Tiongkok sebagai sebuah negara peradaban (*civilizational state*) dan menentukan tujuan dan cara

yang tepat untuk mencapai tujuan keamanan Tiongkok pasca Perang Dingin berakhir (*security strategy*).

Terkait dengan keputusan Tiongkok mengaksesi Traktat TACSA ASEAN, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pemikiran budaya strategis yang dianut dan diyakini oleh para elit-elit politik pengambil kebijakan keamanan luar negeri Tiongkok. Pemikiran budaya strategis tersebut bersumber dari *Confucian Pacifism* sebagai *national security strategic culture* dan dijadikan sebagai *role-model* pendekatan diplomasi keamanannya guna menentukan tujuan dan cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan keamanan Tiongkok di abad ke-21 pasca Perang Dingin berakhir. Sebagai budaya strategis Tiongkok, *Confucian Pacifism* menekankan pada sejumlah aspek penting terkait dengan model diplomasi dan orientasi tujuan keamanan Tiongkok yaitu: *non-militarism, no power politics (hegemonism), defensive grand strategy, non-expansionist, non-violent means, limited wars-aims, no territorial-conquest*, dan *no adversary-annihilation*, yang bersumber pada warisan sejarah Tiongkok, budaya *Confucian (Confucius)*, ajaran Filsuf Tiongkok Laozi, Mozi dan Sunzi. Praktik-praktik hubungan keamanan yang dijalankan oleh ASEAN melalui mekanisme Traktat TACSA bagi Tiongkok memiliki harmonisasi dengan budaya strategisnya tentang preferensi kebijakan, maksud dan tujuan serta strategi yang tepat guna mewujudkan tujuan keamanannya pasca

3. *Soft Power*

Dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Joseph S. Nye, Jr.¹⁹ mendefinisikan *soft power* sebagai berikut yaitu:

*It is ability to get what you want through the attractions rather than coercions or payments. It arises from the attractiveness of a country's culture, political ideals and policies*²⁰.

Soft power didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh apa yang kita inginkan melalui penggunaan “daya tarik” atau “daya pesona” (*attractive actions*) tanpa menggunakan tindakan kekerasan atau transaksional. Dalam proses pembentukannya, *soft power* bersumber pada daya tarik sebuah negara seperti budaya, politik dan kebijakan. *Soft power* itu sendiri didasarkan pada kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain. Dalam membuat keputusan, kita harus membuat peraturan yang “ramah” dan menarik sehingga masyarakat akan mau membantu kita untuk mencapai tujuan bersama.

Kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain ini cenderung dikaitkan dengan penggunaan aset-aset yang tidak terlihat

¹⁹ Joseph S. Nye, Jr. adalah *Harvard University Distinguished Service Professor, Harvard Kennedy School*, sekaligus mantan Dekan *Harvard's Kennedy School of Government*. Nye memperoleh gelar Ph.D dari *Harvard University* dalam bidang Ilmu Politik. Nye merupakan pakar dalam bidang studi Asia, Pertahanan, Diplomasi, Eropa, Kebijakan Luar Negeri, Sejarah, *Intelligence*, Politik Internasional, *Leadership*, Senjata Nuklir, Terorisme dan *United Nations*.

²⁰ Joseph S. Nye, Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. United States of America:

(*intangible power*) seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai (*ideas* dan *values*), institusi politik dan kebijakan-kebijakan yang terlihat yang didasarkan pada hukum yang benar dan memiliki otoritas moral. Jika seorang pemimpin mewakili *ideas* dan *values* yang dianut oleh masyarakat yang dipimpinnya, maka akan lebih mudah baginya untuk memimpin mereka.

Soft power berbeda dengan pengaruh (*influences*) yang bisa didapat dari penggunaan ancaman (*threats*) dan pembayaran (*payments*). Selain itu, *soft power* juga bukan sekedar kemampuan untuk berargumentasi sehingga orang lain setuju dengan pendapat kita, namun juga merupakan kemampuan untuk menarik (*to attract*) dan meyakinkan (*to persuade*). Ketertarikan dapat membuat seseorang meniru orang lain. Jika kita memengaruhi orang lain tanpa adanya ancaman atau syarat pertukaran di dalamnya, maka kita sedang mempraktikkan *soft power* itu sendiri. *Soft power* bekerja dengan alat yang berbeda (bukan dengan kekuatan atau uang) untuk menghasilkan kerjasama yaitu: daya tarik dalam nilai-nilai yang dianut bersama (*shared ideas-values*) dan keadilan, serta kewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian nilai-nilai tersebut.

Dalam kontestasi politik internasional, sumber penghasil *soft power* sebagian besar berasal dari nilai-nilai yang dianut dan diperlihatkan oleh organisasi dan negara dalam konteks kebudayaannya, dalam praktik dan kebijakannya, dan dalam berhubungan dengan negara lainnya. Institusi dapat meningkatkan

soft power suatu negara. Melalui institusi, sebuah negara dapat membuat *power*-nya terlegitimasi, dengan memperlihatkan daya tarik kebudayaan dan ideologinya. Dengan demikian, negara tersebut akan menghadapi sedikit perlawanan atau resistensi dari pihak lainnya, yang pada akhirnya dengan senang hati akan mengikuti kehendak negara tersebut. Dengan membentuk peraturan internasional atau rezim internasional yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilainya, sebuah negara akan terlihat dapat dipercaya di mata pihak lainnya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, *soft power* itu sendiri bersumber pada tiga hal yaitu: budaya, nilai dan kebijakan²¹. *Pertama*, budaya, menurut Joseph S. Nye, Jr., kebudayaan didefinisikan sebagai berikut yaitu:

*It is a set of values and practices that create meaning for society. It has many manifestations. It is common to distinguish between high culture such as literature, art, and education, which appeal to elites, and popular culture, which focuses on mass entertainment*²².

Budaya dalam konteks ini, tidak hanya terkait dengan *high culture* yang menarik untuk kalangan elit, tetapi juga budaya populer (*pop culture*) yang lebih berupa hiburan. Ketika budaya suatu negara mengandung nilai-nilai universal dan kebijakannya memperlihatkan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang juga dimiliki oleh

pihak lainnya, negara tersebut dapat meningkatkan kemungkinan untuk bisa didapatkannya hasil yang diinginkannya karena hubungan antara daya tarik dan kewajiban yang diciptakannya. Banyak yang mengkonklusikan bahwa budaya pop pasti menghasilkan *soft power*, meskipun tidak selalu demikian. Budaya pop akan mampu menghasilkan *soft power* pada konteks yang tepat, seperti halnya sumber *power* yang lainnya.

Kedua, kebijakan, baik yang terkait dengan kebijakan dalam negeri (*domestic politics*) maupun luar negeri (*foreign policies*). Kebijakan luar negeri suatu negara akan sangat memengaruhi *soft power*-nya di mata dunia internasional. Kebijakan yang diambilnya memperlihatkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, sehingga jika kebijakan yang dibuat tersebut dinilai baik, maka suatu negara memperoleh citra baik pula di mata internasional. Kebijakan tersebut dapat berdampak panjang dalam menghasilkan dan mempertahankan *soft power* suatu negara, namun juga dapat berdampak singkat atau pendek, tergantung konteks.

Ketiga, nilai, hal ini terkait dengan nilai-nilai (*ideas* dan *values*) yang dianut oleh pemerintah dalam setiap perilaku (*daily*), dalam organisasi internasional, dan dalam pengambilan kebijakan internasional, akan sangat memengaruhi preferensi pihak lainnya. Pemerintah dapat menarik pihak lain untuk mencontohnya, atau sebaliknya. Akan tetapi, *soft power* itu sendiri tidak selalu berada di

pasukan militer, dikendalikan oleh pemerintah, meskipun ada juga yang merupakan hak kekayaan nasional seperti sumber daya alam dan berbagai sumber lainnya yang dapat berada di bawah kontrol kolektif.

Dalam operasionalisasinya, *soft power* memiliki sejumlah keterbatasan²³ yaitu:

- a. Adanya faktor imitasi, dapat mengurangi efek *soft power*.
- b. Ketergantungan *soft power* pada konteks yang lebih besar dari pada *hard power*.
- c. Daya tarik memiliki efek yang lebih tersebar atau terdistribusi, sehingga sulit untuk melakukan pengukuran secara pasti.
- d. *Soft power* akan menjadi sesuatu yang kurang penting jika *power* hanya dikonsentrasikan hanya pada satu negara.
- e. *Soft power* lebih sering memberikan efek pada tujuan umum suatu negara, meski sering juga berdampak pada tujuan khususnya.
- f. Pemerintah tidak memiliki kontrol penuh atas daya tarik.
- g. Pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

Terkait dengan keputusan Tiongkok untuk menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui pengaksesian Traktat TACSA ASEAN oleh Tiongkok, merupakan implementasi dari

berupaya untuk “menarik hati” dan meyakinkan ASEAN tanpa harus menggunakan tindakan-tindakan kekerasan atau pembayaran untuk mencapai kepentingan Tiongkok. Selain itu, dengan mengaksesi TACSA tersebut, juga merupakan upaya Tiongkok untuk memengaruhi preferensi ASEAN dengan membentuk peraturan internasional atau rezim internasional yang sesuai dengan kepentingan dan bersumber pada nilai-nilai (*ideas* dan *values*) dan kebudayaannya, agar terlihat dapat dipercaya di mata ASEAN. Dengan membuat keputusan tersebut, Tiongkok berupaya membuat peraturan yang “ramah” dan menarik bagi ASEAN sehingga akan mau membantunya untuk mencapai tujuannya.

4. Diplomasi Budaya (*Cultural Diplomacy*)

Dalam tulisannya *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*, Milton C. Cummings, Jr. mendefinisikan diplomasi kebudayaan sebagai pertukaran ide, informasi, seni dan aspek kebudayaan lainnya antara satu negara dengan negara yang lainnya maupun antara masyarakatnya dengan tujuan untuk memelihara sikap saling pengertian (*mutual understanding*), yang mana lebih mirip kegiatan satu arah (*one direction*) daripada pertukaran dua arah (*reciprocal*), seperti ketika suatu negara terfokus pada upayanya untuk mempromosikan bahasa nasionalnya, kebijakannya dan pandangannya terhadap suatu hal atau isu, atau menceritakan sejarahnya kepada negara-negara di dunia²⁴. Lebih

lanjut menurut Neal M. Rosendorf, dalam tulisannya *A Cultural Public Diplomacy Strategy*, secara esensial, diplomasi budaya bukanlah sebuah propaganda, melainkan sebuah proses pendekatan, *relationship building*, dan peningkatan *mutual understanding*²⁵.

Diplomasi budaya berangkat dari fakta bahwa kebudayaan dewasa ini memiliki peranan yang sangat penting (*strategic influences*) dalam percaturan hubungan internasional. Begitu pentingnya suatu kebudayaan, dapat memengaruhi masyarakat di suatu negara (*foreign citizen*), bahkan dapat memengaruhi pula para kepala negaranya (*statesheads*). Dalam tulisannya yang dimuat dalam *Foreign Policy Magazine* pada tahun 2002, Mark Leonard menjelaskan tujuan diplomasi budaya di abad ke-21 saat ini²⁶ yaitu:

- a. Meningkatkan keakraban (*increasing familiarity*), membuat masyarakat berfikir dan mengubah *image* atau persepsi mereka tentang negara tersebut.
- b. Meningkatkan apresiasi (*increasing appreciation*), menghadirkan persepsi yang positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari perspektif negara tersebut.
- c. Merangkul masyarakat (*engaging people*), mendorong masyarakat untuk melihat suatu negara sebagai tujuan yang menarik bagi pariwisata dan studi, membeli barang-barang,

²⁵ Neal M. Rosendorf. "A Cultural Public Diplomacy Strategy." *Toward A New Public Diplomacy: Redirecting U.S. Foreign Policy*. Ed. Philip Seib. New York: Palgrave Macmillan, 2009, p. 176.

²⁶ Kirsten Bound, et al. *Cultural Diplomacy*. London: Demos, 2007, p. 23.

maupun mengadopsi nilai-nilai dan kebudayaan dari negara tersebut.

- d. Memengaruhi sikap masyarakat (*influencing people's behaviour*), meningkatkan dukungan masyarakat terhadap posisi negara tersebut.

Dalam tulisannya *Diplomacy that Works: Best Practices in Cultural Diplomacy*, Cynthia P. Schneider menjelaskan dua karakteristik terpenting dari setiap program diplomasi budaya yaitu: *pertama*, diplomasi budaya tersebut harus mampu menggambarkan dan menjelaskan beberapa aspek strategis dari nilai-nilai (*ideas* dan *values*) yang cocok dan dapat diterima dengan baik oleh yang menerimanya (*audiences*). *Kedua*, lingkungan (*environmental factor*), juga berperan penting karena merupakan sesuatu yang mutlak harus dipahami demi efektifnya sebuah diplomasi, karena adanya deferensiasi di negara-negara di seluruh dunia²⁷.

Budaya dapat menjadi penentu bagaimana seseorang melihat orang lain dan bernegosiasi dengan berbagai perbedaan yang ada. Budaya juga memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak orang dan kemudian menjadikannya media bagi diplomasi budaya itu sendiri. Diplomasi budaya sebagai salah satu bagian dari diplomasi publik, menurut Jian Wang dalam tulisannya *Localizing Public Diplomacy: The Role of Sub-National Actors in Nation Building*, menjelaskan bahwa terdapat tiga level dalam aktivitas diplomasi

²⁷ Cynthia P. Schneider. *Diplomacy that Works: Best Practices in Cultural Diplomacy*. Center for Arts and Culture Georgetown University, 2003, p. 4.

publik dimana masing-masing level tersebut membutuhkan keterlibatan dari konfigurasi aktor yang berbeda. Tiga level tersebut adalah *pertama*, mempromosikan tujuan dan kebijakan nasional suatu negara (aktor nasional). *Kedua*, mengkomunikasikan ide-ide, cita-cita, falsafah dan nilai-nilai (*ideas* dan *values*) nasional (aktor nasional dan sub-nasional). *Ketiga*, membangun pemahaman bersama (*shared understandings*) dan menjalin suatu hubungan (aktor sub-nasional)²⁸. Dari ketiga level tersebut, aspek budaya bersifat *operationalizable*.

Lebih lanjut menurut Ronit Appel, et al. dalam tulisannya *Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in Promoting Israel's Public Image*, keuntungan diplomasi budaya sangat banyak. *Pertama*, diplomasi budaya membantu menciptakan forum interaksi antara orang-orang dari negara yang berbeda sehingga tercipta suatu wadah untuk menjalin pertemanan dan membentuk koneksi di antara mereka²⁹. *Kedua*, diplomasi budaya juga membantu menciptakan sebuah "*foundation of trust*" dengan orang lain. Untuk selanjutnya, para pembuat kebijakan dapat membangun kepercayaan (*trust*) guna mengadakan perjanjian politik, keamanan, ekonomi dan militer³⁰. Lebih jauh lagi, diplomasi budaya dapat dengan sukses menjangkau orang-orang yang

²⁸ Jian Wang. "Localizing Public Diplomacy: The Role of Sub-National Actors in Nation Branding." *Place Branding* 2.1 (2006), p. 32-42.

²⁹ Ronit Appel, et al. "Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in Promoting Israel's Public Image." Paper. 2008, p. 9.

³⁰ Ronit Appel, et al. "Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in Promoting Israel's Public Image." Paper. 2008, p. 9.

berpengaruh yang tidak dapat dijangkau lewat diplomasi tradisional biasa³¹. Tidak jarang diplomasi budaya menjadi instrumen efektif dan efisien saat momen-momen menegangkan ataupun konflik terjadi³². Dalam hal ini, Cynthia P. Schneider berpendapat bahwa diplomasi budaya merupakan sebuah contoh utama dari *soft power*. Namun menurutnya, diplomasi ini sering dipandang sebelah mata karena terlalu lemah (*soft*) dan terpinggirkan dari isu sebuah kebijakan.

Selain itu, dampak dari kegiatan diplomasi budaya relatif sulit untuk dilihat dan diukur secara pasti. Hal itu disebabkan karena tujuan utama dari program diplomasi budaya adalah untuk menarik hati dan meyakinkan masyarakat luar negeri serta memperoleh *respect* dari mereka³³. Beberapa *angle* keuntungan yang berasal dari program diplomasi budaya mungkin tidak akan terlihat hingga implementasinya yang dilakukan selama bertahun-tahun³⁴. Namun meskipun tidak selalu terlihat dan dapat diukur, program diplomasi budaya tidak dapat diragukan lagi memiliki efek langsung kepada mereka yang ikut serta atau berpartisipasi dalam program tersebut. Perasaan dan pesan yang tertinggal kepada para partisipan dan audiences yang terlibat ini dapat dirasakan dan bukan tidak mungkin akan dapat bertahan lama³⁵. Dengan demikian, meskipun tujuan

³¹ *About U.S. Public Diplomacy*. n.d. 4 November 2014. <pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6>.

³² Cynthia P. Schneider, "Cultural Diplomacy: Hard to Define but World-Known," *ISN* 10, no. 1 (2007): 1-10.

utama dari diplomasi budaya yaitu: memengaruhi pemikiran dan hati orang lain tidak dapat diukur secara pasti (*scientifically*), derajat dampak positif yang dihasilkan dari program ini terhadap orang-orang yang berpartisipasi masih dapat dilihat³⁶.

Terkait dengan keputusan Tiongkok untuk menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui pengaksesian Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan implementasi dari diplomasi kebudayaan *ala* Tiongkok. Dengan mengaksesi traktat tersebut, Tiongkok berupaya untuk *pertama*, mempromosikan tujuan dan kebijakan nasional negaranya. *Kedua*, mengkomunikasikan ide-ide, cita-cita, falsafah dan nilai-nilai (*ideas* dan *values*) nasionalnya. *Ketiga*, membangun pemahaman bersama (*shared understandings*) antara Tiongkok dan ASEAN dan menjalin suatu hubungan yang lebih erat lagi (*relationship building*) agar terbentuk *foundation of trust* diantara keduanya.

E. Hipotesis

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan suatu hipotesis yang menjelaskan mengenai latar belakang Tiongkok mengaksesi protokol keamanan utama ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA) pada tahun 2003 yaitu: Pengarusutamaan budaya strategis *Confucian Pacifism* dalam diplomasi keamanan baru Tiongkok terhadap ASEAN pasca Perang Dingin.

³⁶ *Ibid.*

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih mempermudah proses penyelesaian penulisan penelitian ini, maka untuk menghindari kekeliruan dan ketidakfokusan (keabsurban) dalam pembahasannya, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada analisis terhadap dinamika perubahan postur kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negeri Tiongkok terhadap ASEAN, dari yang bersifat *militarism, use of force, offensive grand strategy, expansionist*, dan *violent means*, pada era Perang Dingin sebagai konsekuensi *Cultural Realism* sebagai budaya strategis keamanan nasionalnya, hingga reorientasi strategisnya terhadap kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya, yang bersifat *non-militarism, non-use of force, defensive grand strategy, non-expansionist* dan *non-violent means* pasca Perang Dingin, sebagai konsekuensi kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya strategis keamanan nasionalnya, hingga tahun 2003 ketika Tiongkok mengaksesi Traktat TACSA ASEAN. Namun tidak menutup kemungkinan jika diperlukan, maka penulis akan menggunakan data-data periode sebelumnya jika masih relevan untuk digunakan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu: metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan kepada para pembaca mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data (*data collection*) yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tela'ah kepustakaan (*library research*) yaitu: pengumpulan data dengan menela'ah sejumlah literatur-literatur seperti buku-buku, *book sections*, jurnal ilmiah, *articles in a periodical*, *reports*, *documents from websites*, *conference proceedings* dan *websites*.

Adapun tempat-tempat yang dijadikan oleh penulis sebagai pusat sumber informasi dan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
- b. Laboratorium Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UMY (Lab. HI).
- c. Pusat *Repository* Data UMY.
- d. *Research Center Room* Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UMY.
- e. Dan lain-lain.

3. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Bersumber dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan proses penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu: data yang diperoleh bukan dalam bentuk numerik atau data-data yang berbentuk angka, namun melalui beberapa faktor-faktor yang relevan dengan penelitian ini, yakni dengan menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil ditemukan dan kemudian menyajikan data hasil temuan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada Bab I, penulis ingin menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II, penulis ingin menjelaskan mengenai profil protokol keamanan utama ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA). Penulis akan menjabarkan mengenai proses terbentuknya TACSA sebagai arsitektur keamanan kawasan di Asia Tenggara. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan mengenai kebijakan ekspansif ASEAN terhadap TACSA sebagai upaya diplomasi preventifnya untuk mencegah timbulnya peperangan dan konflik kekerasan guna menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan.

Pada Bab III, penulis ingin menjelaskan mengenai deferensiasi tiga tipeologi budaya strategis Tiongkok yang terdiri atas *Confucian Pacific*

Cultural Realism dan *Structural Realism*. Penulis akan menjabarkan mengenai asal mula, ajaran-ajaran utama dan pengaruhnya terhadap preferensi strategi kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanan nasional dan luar negeri Tiongkok.

Pada Bab IV, penulis ingin menjelaskan mengenai dampak pengaruh-utama-an budaya strategis *Confucian Pacifism* dalam diplomasi keamanan baru Tiongkok pasca Perang Dingin. Penulis akan menjabarkan mengenai kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya strategisnya pasca Perang Dingin dan pengaruhnya terhadap diplomasi keamanan Tiongkok baik secara regional maupun global. Selain itu, penulis akan menjabarkan mengenai pengaruh atau/ dampak ajaran-ajaran utama budaya strategis *Confucian Pacifism* yang melatarbelakangi keputusan Tiongkok untuk mengaksesi Traktat TACSA ASEAN.

Pada Bab V, penulis ingin menjelaskan mengenai Kesimpulan dari penelitian yang dibuat oleh penulis.